

**EFEKTIVITAS PENCATATAN ASET DESA DALAM MENDUKUNG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**

Dwi Anggraini¹ , M. Kendry Widiyanto²

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹ raniaa27@gmail.com

² kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan magang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami penerapan teori administrasi publik dalam praktik nyata pemerintahan daerah, khususnya terkait pengelolaan dan pencatatan aset desa. Selama magang, mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti rekapitulasi data administrasi pemerintahan desa, penginputan data APBDes, validasi tanah kas desa, serta pemeriksaan dokumen Dana Desa bidang stunting dan ketahanan pangan. Pengalaman ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan. Meskipun terdapat kendala seperti keterlambatan laporan dari desa dan ketidaksamaan format data, kegiatan ini tetap memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kemampuan analisis, tanggung jawab, serta keterampilan manajerial mahasiswa. Hasil magang menunjukkan bahwa efektivitas administrasi pemerintahan desa sangat bergantung pada ketepatan pencatatan aset dan pembaruan data secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Magang, Pencatatan Aset Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, DPMD Sidoarjo

ABSTRACT

Internship activities at the Office of Community and Village Empowerment (DPMD) of Sidoarjo Regency provided students with the opportunity to apply public administration theories in real-world government practice, particularly regarding village asset management and documentation systems. During the internship, students were involved in various tasks such as administrative data recapitulation, APBDes data entry, validation of village land assets, and examination of fund utilization documents for stunting and food security programs. This experience provided valuable insights into the importance of transparency and accountability in asset management as part of orderly village governance. Although some challenges arose, such as delayed village reports and inconsistent data formats, the internship significantly enhanced students' analytical and managerial skills. The results indicate that the effectiveness of village administration depends largely on accurate asset documentation and continuous data updating.

Keywords: Internship, Village Asset Recording, Village Administration, DPMD Sidoarjo

PENDAHULUAN

Aset desa merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, bangunan, kendaraan operasional, sarana prasarana publik, maupun kekayaan lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks pemerintahan desa, aset memiliki peran penting sebagai sumber daya yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang menghadapi berbagai kendala dalam hal pencatatan, pemanfaatan, dan pengawasan aset desa. Permasalahan yang kerap muncul antara lain adalah belum optimalnya sistem administrasi, keterbatasan kemampuan aparatur desa, serta minimnya pemahaman terhadap tata kelola aset yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menyebabkan data aset yang dimiliki oleh pemerintah desa seringkali tidak akurat dan tidak terbaru secara berkala. Akibatnya, proses perencanaan pembangunan, penyusunan laporan keuangan desa, maupun audit aset menjadi kurang efektif. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pencatatan aset desa harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data yang valid agar dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengelolaan aset desa. Sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, DPMD menjadi garda terdepan dalam memastikan agar seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo dapat menjalankan administrasi pemerintahan secara tertib dan sesuai regulasi. Salah satu fokus utama DPMD adalah membangun sistem pencatatan aset yang terintegrasi, sehingga memudahkan proses verifikasi dan pelaporan aset dari desa ke tingkat kabupaten. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital yang diwujudkan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam era digital saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan administrasi publik. Melalui penerapan konsep Desa Digital, DPMD Sidoarjo berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk implementasinya adalah digitalisasi sistem pencatatan aset desa agar lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Penerapan sistem berbasis elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset publik. Dengan demikian, kebijakan DPMD Sidoarjo dalam memperkuat sistem administrasi berbasis digital sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan birokrasi yang responsif dan transparan.

Selain berperan dalam pembinaan administrasi pemerintahan, DPMD juga menjadi mitra penting bagi dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian di instansi pemerintah seperti DPMD memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengintegrasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan

praktik kerja nyata. Mahasiswa dari Program Studi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dapat belajar langsung mengenai mekanisme kerja birokrasi pemerintahan daerah, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan aset publik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses rekapitulasi data administrasi pemerintahan desa, input data APBDes, validasi tanah kas desa, serta pemeriksaan laporan Dana Desa.

Kegiatan pengabdian juga menjadi sarana pembelajaran yang melatih kemampuan analisis, tanggung jawab, kedisiplinan, dan profesionalitas mahasiswa. Dengan terjun langsung dalam sistem kerja DPMD, mahasiswa dapat merasakan dinamika lingkungan birokrasi dan memahami pentingnya kolaborasi antarbagian untuk mencapai efektivitas administrasi pemerintahan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan rekapitulasi dan validasi aset desa turut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola aset di tingkat desa. Hal ini menjadi bukti bahwa kegiatan pengabdian bukan hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak sosial dan administratif bagi instansi yang menjadi tempat pelaksanaan.

Serta pelaksanaan pengabdian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi publik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami bahwa efektivitas administrasi pemerintahan desa sangat bergantung pada ketepatan pencatatan aset, keakuratan data, serta komitmen dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan dukungan sistem digital dan pengawasan yang berkelanjutan, DPMD Sidoarjo diharapkan dapat terus berinovasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing di era modern.

Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pengalaman pengabdian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, meliputi berbagai kegiatan yang diikuti, tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta manfaat positif yang diperoleh oleh mahasiswa. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran DPMD dalam membina dan mengembangkan pemerintahan desa, diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang untuk berkarier di bidang administrasi publik serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh penulis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga 29 Agustus 2025 merupakan pengalaman berharga yang memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya memahami bagaimana proses administrasi publik dijalankan di tingkat pemerintahan daerah, tetapi juga belajar mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang relevan dengan bidang administrasi pemerintahan desa.

Sebagai bagian dari program pengabdian, penulis ditempatkan di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, yang memiliki tugas utama dalam pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu observasi dan adaptasi, di

mana penulis mengenal lingkungan kerja, mempelajari struktur organisasi, alur kerja, serta mekanisme pelayanan administrasi desa di lingkungan DPMD.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan operasional, di mana penulis berperan aktif dalam berbagai kegiatan administratif seperti membantu proses rekapitulasi data administrasi desa, validasi tanah kas desa, penginputan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta verifikasi dokumen Dana Desa yang berkaitan dengan program stunting dan ketahanan pangan (hanpang). Melalui keterlibatan langsung ini, penulis memperoleh pemahaman praktis mengenai proses administrasi pemerintahan desa dan sistem pelaporan yang berlaku.

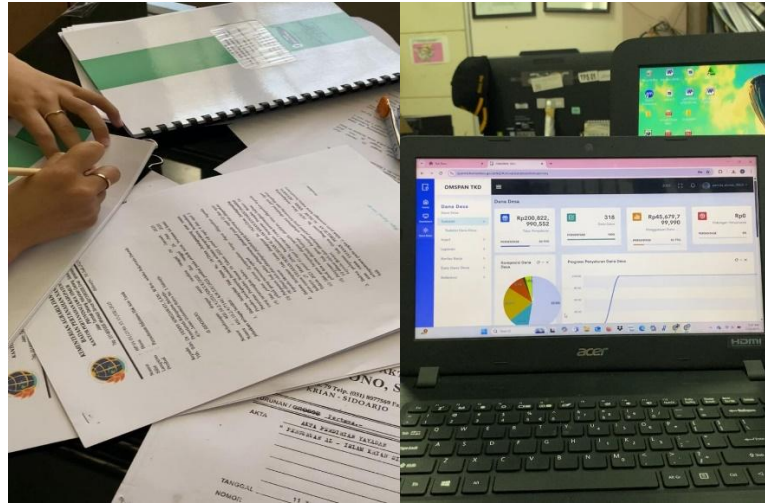
Selain itu, penulis juga melaksanakan studi dokumen, yaitu menelaah berbagai arsip, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung seperti data aset desa dan laporan realisasi keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami prosedur pencatatan aset dan pengelolaan data administrasi secara menyeluruh. Penulis juga melakukan diskusi dan wawancara informal dengan pegawai bidang administrasi pemerintahan desa untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang tanggung jawab, mekanisme kerja, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi desa.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, di mana penulis menyusun hasil kegiatan magang, mendokumentasikan temuan lapangan, serta menyampaikan hasil refleksi kepada pembimbing bidang di DPMD. Melalui tahapan ini, penulis dapat mengaitkan pengalaman praktis dengan teori administrasi publik yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan administrasi untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai proses tata kelola pemerintahan desa. Dengan metode ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pelaksana yang turut berkontribusi dalam mendukung efektivitas administrasi pemerintahan di lingkungan DPMD Kabupaten Sidoarjo.

HASIL & PEMBAHASAN

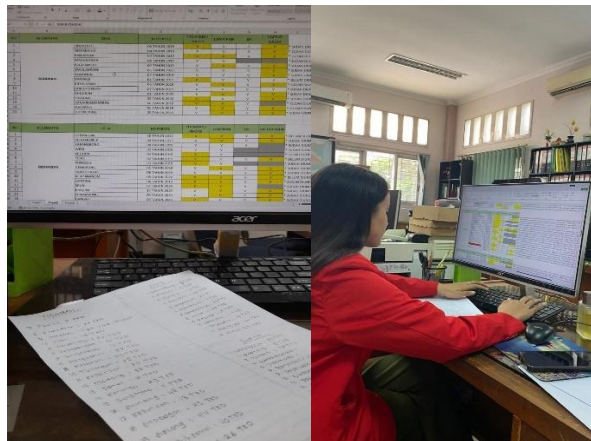
Kegiatan pengabdian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, khususnya dalam memahami bagaimana administrasi pemerintahan desa dijalankan secara nyata. Selama melaksanakan magang, penulis memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi dan pencatatan aset desa. Pengalaman ini membantu penulis memahami bahwa efektivitas administrasi pemerintahan desa sangat bergantung pada ketertiban data, sistem pencatatan aset yang akurat, serta koordinasi antara pemerintah desa dan pihak dinas.

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan selama pengabdian adalah rekapitulasi data administrasi pemerintahan desa. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap desa di Kabupaten Sidoarjo memiliki data administrasi yang lengkap dan sesuai ketentuan. Penulis membantu dalam pengumpulan dan penyusunan data dari desa, seperti dokumen kependudukan, profil desa, laporan kegiatan, serta data aset milik desa. Melalui kegiatan ini, penulis memahami bahwa konsistensi pelaporan menjadi kunci dalam membangun sistem administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.



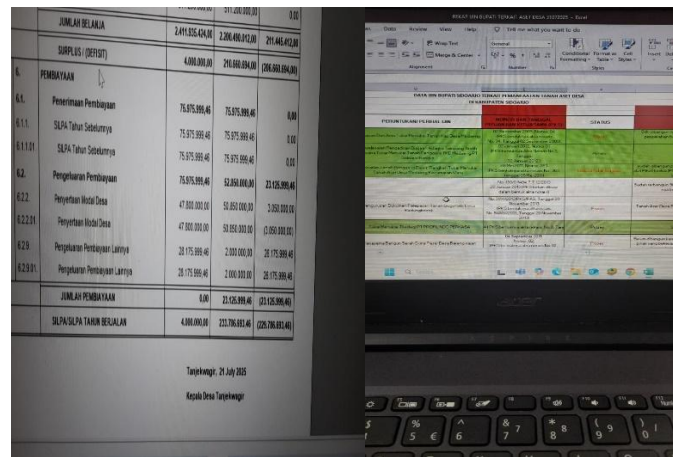
Gambar 1. Rekap Data Administrasi Pemerintah Desa dan Penyaluran Dana Desa

Selain rekapitulasi administrasi, penulis juga terlibat dalam kegiatan validasi tanah kas desa. Proses ini dilakukan untuk memastikan status dan penggunaan tanah milik desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan validasi ini penting agar tidak terjadi kesalahan data, tumpang tindih kepemilikan, maupun penyalahgunaan aset desa. Melalui pengalaman tersebut, penulis mengetahui bahwa validasi aset desa memerlukan ketelitian, koordinasi lintas bidang, serta kemampuan analisis data yang baik.



Gambar 2. Rekapitulasi Dan Validasi Data Tanah Kas Desa

Kegiatan lainnya adalah penginputan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam tahap ini, penulis membantu staf bidang untuk memastikan data keuangan desa sudah sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh masing-masing desa. Proses penginputan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana, terutama pada program-program prioritas seperti penanggulangan stunting dan ketahanan pangan (hanpang). Melalui kegiatan ini, penulis belajar tentang pentingnya prinsip akuntabilitas keuangan dalam pemerintahan desa, di mana setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.



Jumlah Belanja			
	2.411.824.424,00	2.208.480.402,00	201.444.022,00
SURPLUS (DEFISIT)	4.080.000,00	210.000.000,00	(205.920.000,00)
A. PENDAPATAN			
A.1. Penerimaan Pendapatan	75.975.999,46	75.975.999,46	0,00
A.1.1. SDA Tahun Sebelumnya	75.975.999,46	75.975.999,46	0,00
A.1.1.1. SDA Tahun Sebelumnya	75.975.999,46	75.975.999,46	0,00
A.2. Pengeluaran Pendapatan	75.975.999,46	52.650.000,00	23.325.999,46
A.2.2. Pengeluaran Modal Desa	47.000.000,00	50.000.000,00	3.000.000,00
A.2.2.2.1. Pengeluaran Modal Desa	47.000.000,00	50.000.000,00	(3.000.000,00)
A.2.3. Pengeluaran Pendapatan Lainnya	28.975.999,46	2.000.000,00	26.975.999,46
A.2.3.2.1. Pengeluaran Pendapatan Lainnya	28.975.999,46	2.000.000,00	26.975.999,46
Jumlah Pendapatan	0,00	23.325.999,46	(23.325.999,46)
Saldo SDA Tahun Berjalan	4.080.000,00	221.700.002,46	(225.780.002,46)

Tanggal: 21 July 2025
Kantor Desa Tarungrejo

Gambar 3. Rekapitulasi Data APBDes Dan Pemanfaatan Tanah Aset Desa

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan, penulis memperoleh pemahaman mendalam bahwa DPMD memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Melalui pembinaan yang berkelanjutan, pengawasan administratif, serta penguatan sistem informasi, DPMD berkontribusi besar terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa. Selain itu, pelaksanaan magang ini juga memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam melatih kemampuan analisis, komunikasi, dan kerja sama tim di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Dengan demikian, pengalaman pengabdian ini tidak hanya memberikan pemahaman praktis tentang administrasi pemerintahan desa, tetapi juga memperkuat kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan lokal. Penulis menyadari bahwa efektivitas administrasi desa bukan hanya ditentukan oleh aturan dan prosedur, tetapi juga oleh komitmen, kolaborasi, dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, diperoleh pembelajaran bahwa efektivitas pencatatan aset desa sangat menentukan tertib administrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan laporan dari desa dan perbedaan format data antar wilayah. Namun, melalui koordinasi yang baik antara pihak desa dan DPMD, hambatan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Pengalaman ini memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai beberapa teori yaitu :

1. Teori Good Governance (UNDP, 1997)

Menurut UNDP, prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aset desa (Isabela & Nailufar, 2022). Dalam praktiknya, DPMD Kabupaten Sidoarjo menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pencatatan aset yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap data aset yang masuk harus diverifikasi sesuai dengan dokumen pendukung, seperti berita acara serah terima, bukti kepemilikan, dan laporan pemanfaatan aset desa. Akuntabilitas publik berarti setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Rohman & Hanafi, 2019). Dengan adanya sistem pencatatan aset yang rapi dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa dapat meningkat.

2. Teori Efektivitas Organisasi (Steers, 1985)

Menurut Steers (1985), efektivitas organisasi diukur dari sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dalam konteks DPMD Sidoarjo, efektivitas dapat dilihat dari ketepatan waktu dan keakuratan data pencatatan aset desa. Proses administrasi yang efisien mencerminkan organisasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai target dan standar pelayanan. Pelaksanaan pencatatan aset desa yang sistematis di DPMD menunjukkan adanya peningkatan efektivitas organisasi, terutama dalam hal pelayanan data dan pelaporan kepada pemerintah kabupaten. Hal ini mendukung pendapat (Siagian, 2006) yang menyatakan bahwa efektivitas administrasi merupakan kemampuan organisasi publik untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai peraturan dan tujuan organisasi.

3. Teori Administrasi Publik Klasik (Max Weber, 1947)

Teori administrasi publik klasik yang dikemukakan oleh Max Weber 1947 dalam (Safuandi, 2025) Dalam konteks pencatatan aset desa, teori ini menjelaskan bahwa setiap proses administrasi harus dilaksanakan sesuai prosedur, memiliki dokumentasi yang jelas, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. DPMD Kabupaten Sidoarjo menjalankan fungsi ini melalui pembagian tugas yang jelas antarbidang, serta memastikan bahwa pencatatan aset dilakukan berdasarkan dokumen resmi dan sesuai pedoman teknis dari pemerintah daerah. Penerapan prinsip birokrasi ini mencerminkan upaya DPMD untuk menjaga tertib administrasi dan menghindari kesalahan dalam proses pengelolaan aset desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam memahami proses administrasi pemerintahan desa secara langsung. Melalui keterlibatan dalam kegiatan rekapitulasi data, validasi aset, serta penginputan APBDes, mahasiswa memperoleh pemahaman tentang pentingnya ketertiban administrasi dan transparansi pengelolaan aset desa. DPMD Sidoarjo memiliki peran strategis dalam membina serta memastikan administrasi pemerintahan desa berjalan tertib dan sesuai peraturan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan profesional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo diharapkan terus mengembangkan sistem administrasi berbasis digital untuk mempercepat proses rekapitulasi dan pelaporan data dari desa ke tingkat kabupaten. Aparatur desa juga perlu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan penggunaan teknologi informasi agar lebih adaptif terhadap sistem pemerintahan modern. Sementara bagi mahasiswa, kegiatan pengabdian seperti ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk menambah wawasan, pengalaman, serta keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja, terutama dalam bidang administrasi publik dan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Isa, R. (n.d.). *EFEKTIVITAS ORGANISASI KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK SETELAH MENJADI PERANGKAT DAERAH*.

Isabela, M. A. C., & Nailufar, N. N. (2022). *Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>

Rohman, Abd., & Hanafi, Y. (2019). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *REFORMASI*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>

Safuandi. (2025, September). *Birokrasi Dalam Perspektif Max Weber* -. <https://argumen.co.id/2025/09/17/birokrasi-dalam-perspektif-max-weber/>

Siagian, S. P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Sondang P. Siagian / Siagian, Sondang P.* Jakarta: Bumi Aksara. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/2fxbn>